



Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Dinas Sosial Kota Cirebon bagi penyandang Disabilitas

Tiara Nurahayu¹, Jefik Zulfikar²

¹ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia: tiaranurahayu0811@gmail.com

² IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia: jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Empowerment;
government; person with
disabilities

How to cite:

Nurahayu, Tiara. &
Zulfikar, Jefik. (2023).
Pemberdayaan Sosial dan
Ekonomi pada Dinas
Sosial Kota Cirebon bagi
penyandang Disabilitas.
Jurnal Empower: Jurnal
Pengembangan
Masyarakat Islam, Vol. 8
(No.2), 277-291.

Article History:

Received: October, 18th 2023

Accepted: December, 31st 2023

Publishe: December, 31th 2023

**COPYRIGHT © 2022 by
Jurnal Empower: Jurnal
Pengembangan
Masyarakat Islam.** This
work is licensed under a
Creative Commons
Attribution 4.0
International License

ABSTRACT

Every citizen, including people with disabilities, has the right to decent work and a dignified life. Nevertheless, individuals with disabilities often face marginalization and unequal treatment. The Social Affairs Office plays a role in empowering them through health assistance, productivity facilitation, skills training, and entrepreneurship. This research on the Optimization of Social and Economic Empowerment of People with Disabilities is qualitative and descriptive, utilizing a literature review approach. The aim is to understand the empowerment of people with disabilities, particularly regarding health assistance and economic aspects, within the Social Affairs Office of Cirebon City. The study focuses on all activities and programs of the social affairs office related to individuals with disabilities, emphasizing the concepts of social and economic empowerment that have been implemented. The research findings indicate that the Social Affairs Office of Cirebon City has played a reasonably good role in empowering people with disabilities in terms of health and economic support. However, full optimization has not been achieved due to various non-technical implementation barriers. These barriers are influenced by factors such as the lack of public knowledge about the social affairs office's programs for empowering individuals with disabilities. Additionally, the most dominant factor influencing the success of empowerment is the need for self-motivation and development among individuals with disabilities.

ABSTRAK

Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak pada pekerjaan dan kehidupan layak. Meski demikian, penyandang disabilitas seringkali mengalami marginalisasi dan ketidaksetaraan hak. Dinas Sosial berperan dalam memberdayakan mereka melalui bantuan kesehatan, fasilitasi produktivitas, serta bimbingan keterampilan dan usaha. Penelitian Optimasi Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi

Penyandang Disabilitas ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan penyandang disabilitas dari segi pemenuhan bantuan Kesehatan serta dalam bidang ekonomi pada Dinas Sosial Kota Cirebon. Penelitian ini berfokus pada segala kegiatan dan program kerja pada dinas sosial untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dengan konsep pemberdayaan sosial serta ekonomi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Cirebon dalam pemberdayaan penyandang disabilitas pada pemenuhan Kesehatan dan ekonomi telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan diluar teknis pelaksanaan. Hambatan yang terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya program dari Dinas Sosial terhadap pemberdayaan disabilitas serta masih harus ditingkatkannya faktor yang paling dominan untuk mendukung suksesnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas yakni adanya motivasi untuk berkembang dari penyandang disabilitas itu sendiri.

1. PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia bukanlah sekadar isu sampingan. Realita kehidupan menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih berjuang untuk meraih tempat di dunia kerja, mendapatkan akses pendidikan yang setara, dan bahkan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Perlahan namun pasti, mereka menjadi objek ketidaksetaraan sosial, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi yang mengakar dalam masyarakat. Di balik ketidaksetaraan ini terkandung potensi besar yang terabaikan. Artikel ini akan menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, menyajikan fakta-fakta yang jarang terdengar, dan mengajak kita semua untuk bersama-sama meruntuhkan dinding ketidaksetaraan yang masih menghalangi mereka. Mari kita melangkah lebih jauh dan bersama-sama memberi warna baru untuk masa depan penyandang disabilitas di Indonesia.

Pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penghidupan serta kesejahteraan mereka. Penyandang disabilitas adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas dilingkungan masyarakat cenderung mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan perbedaan

fisik maupun dari faktor lain yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terkadang menjadi objek diskriminasi yang merugikan mereka, hal tersebut terjadi dalam berbagai aspek kehidupan yang mereka jalani. Masyarakat juga masih menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, membutuhkan bantuan dalam segala hal. Mulai dari dunia kerja, sebagian besar masyarakat masih menganggap sebelah mata kemampuan penyandang disabilitas. Selain itu juga dalam bidang Pendidikan, Kesehatan maupun ekonomi yang erat kaitannya dengan pekerjaan. Dengan demikian lingkungan dimana penyandang disabilitas berada cenderung tidak mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas serta bisa menghambat keberlangsungan hidup baik dari segi kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya yang harus terpenuhi serta dari segi ekonomi yang masih belum banyak bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas (Luthfia, 2020).

Pandangan masyarakat pada penyandang disabilitas menjadi suatu penyebab eksternal dari disabilitas yang dialami oleh seseorang, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat diminimalisir dengan menggeser pandangan umum mengenai sebab terjadinya disabilitas pada seseorang yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap pandangan sosial yang harusnya lebih diperhatikan lagi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umum dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas tanpa memandang orang dengan apa yang melekat maupun apa yang terlihat dari fisiknya sebagai suatu kekurangan dan mendiskriminasi dalam mendapatkan haknya, maka akan terbentuk kesadaran bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang harus terpenuhi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya (Susilawati, 2016).

Hak atas berbagai layanan sosial bagi penyandang disabilitas yang sesuai kebutuhan sangat diperlukan karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, peluang yang sama serta kedudukan yang sama (Nuraviva et al., 2017). Hal ini diperlukan guna memenuhi kebutuhan dari penyandang disabilitas agar bisa menjalani keseharian dengan lebih mudah. Pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada para penyandang disabilitas mengandung makna yang penting bagi kelangsungan hidup individu-individu penyandang disabilitas, berkaitan juga dengan pembentukan identitas sosial dari penyandang disabilitas itu sendiri.

Penyandang disabilitas tidak perlu lagi terus-menerus terjebak dalam keadaan yang kurang memungkinkan untuk menjalani hari-harinya karena

keterbatasan baik dari segi Kesehatan maupun mental. Karena pengakuan atas hak penyandang disabilitas adalah sumber daya penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan moral dari para penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan peluang untuk dapat menjalani kehidupan pribadi dan sosial yang bermakna. Salah satunya penyandang disabilitas harus memperoleh persamaan dan kesempatan dalam mengakses berbagai hal dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Sholeh, 2016).

Dengan demikian perlu adanya pemberdayaan sosial maupun ekonomi bagi penyandang disabilitas agar hak dan kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan termasuk untuk mendapatkan haknya dalam berbagai ranah sosial, pendidikan yang layak serta pemenuhan bantuan baik dari segi Kesehatan maupun ekonomi bagi penyandang disabilitas itu sendiri (Andayani & Afandi, 2019). Hal tersebut dapat menjadikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa lebih produktif dalam menjalani fungsi-fungsi lain dalam menjalani kehidupan.

Memberi ruang yang lebih luas pada penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupannya menjadi suatu gagasan penting dalam suatu program dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, hal tersebut menjadi suatu dasar untuk peninjauan Kembali bagi program yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat atau badan pemerintah tertentu yang cakupannya bisa menjadi ruang lingkup untuk penyandang disabilitas untuk mendapat bantuan sosial maupun ekonomi agar penyandang disabilitas bisa lebih terurus dan terjaga dalam pemenuhan kebutuhannya.

Penelitian tentang pemberdayaan disabilitas bukanlah yang pertamakali dilakukan. Penelitian sebelumnya telah ada yang membahas mengenai stigma diskriminatif dan strategi pemberdayaan penyandang disabilitas. Stigma ketidakberdayaan penyandang disabilitas masih terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (Siregar & Purbantara, 2020). Kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial pada kelompok mayoritas penyandang disabilitas fisik dapat dilakukan dengan pemberian bekal kegiatan-kegiatan yang bernilai ekonomi guna menjadi wadah kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi para anggotanya (Dhairyya & Herawati, 2019). Kemudian mengenai peran lembaga pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi peran fasilitatif (semangat sosial, mediasi dan negosiasi, pendukung, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya, mengorganisasi), peran edukatif (memberikan informasi, peningkatan

kesadaran, pelatihan), peran representasi (mendapatkan sumber, advokasi, memanfaatkan mediamasa, jaringan kerja, berbagi pengetahuan dan pengalaman) dan peran teknis (penelitian, menggunakan komputer, presentasi, dan manajemen) (Wijayanto, 2023).

Perbedaan penelitian yang telah ada denelitian ini adalah pada pembahasan peran lembaga pemerintah Kota Cirebon yang fokus terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas yang menjadi tugas pokok pada Dinas Sosial dalam pemenuhan hak sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas serta fasilitas-fasilitas yang dimudahkan untuk penyandang disabilitas berupa kemudahan dalam akses Kesehatan dan pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas di Kota Cirebon, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas guna unyuk mengembangkan kemampuan dan menjadi modal untuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

Di kota Cirebon penyandang disabilitas mendapatkan bantuan serta pemberdayaan sosial dan ekonomi dari pemerintah melalui Dinas Sosial yang salah satu tugas dan fungsinya memberikan bantuan sosail bagi yang membutuhkan. Salah satunya yakni program bagi penyandang disabilitas dimana penyandang disabilitas diberikan alat bantu maupun tunjangan Kesehatan serta bantuan ekonomi yang nantinya dapat dikembangkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Program ini dirancang sesuai dengan atura yang berlaku dipemerintahan kota Cirebon.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan) baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, majalah, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. *Library research* digunakan sebagai langkah peneliti dalam menetapkan topik penelitian, melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan cara mengumpulkan bahan yang akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh hasil penelitian. Pada penelitian ini menggunakan Perspektif eksploratif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal yang memadai tentang sebuah fenomena yang terdapat di tengah masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dinas Sosial Kota Cirebon

Dinas Sosial Kota Cirebon adalah sebuah lembaga pemerintahan di kota Cirebon yang bertanggung jawab dalam mengelola program dan kegiatan sosial. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat yang membutuhkan (Pemda Kota Cirebon, 2023a). Sejarah Dinas Sosial Kota Cirebon dimulai pada tahun-tahun awal kemerdekaan, ketika negara kita sedang dalam proses pembangunan dan pengembangan struktur pemerintahannya. Dinas Sosial dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Profil Dinas Sosial Kota Cirebon meliputi berbagai program dan kegiatan yang mereka jalankan. Salah satu program yang paling umum adalah program bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu yakni dengan adanya data-data mengenai presentase jumlah keluarga yang kurang mampu (Pemda Kota Cirebon, 2023b). Program ini termasuk pemberian bantuan tunai, bantuan pangan, dan bantuan lainnya kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak terlantar, dan orang dengan disabilitas.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Cirebon juga terlibat dalam program pembangunan sosial dan upaya pencegahan masalah sosial di masyarakat. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat, untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengangguran. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Kota Cirebon bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mereka juga mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam bidang kegiatan sosial.

3.2. Paradigma Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang digolongkan sebagai kaum marginal atau terpinggirkan. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya (Purnaningrum et al., 2021).

Pada kehidupan dimasyarakat ada anggapan mengenai penyandang disabilitas yang dianggap sebagai aib, memalukan, sehingga membuat pihak keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan. Penyandang disabilitasakan disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan serta selalu berpaku pada pola pikir masyarakat yang mendiskriminasi yang bertentangan dengan hak-hak asasi yang sebenarnya harus terpenuhi oleh penyandang disabilitas (Mulyanah, 2021). Pada pandangan masyarakat para penyandang disabilitas cukup hanya dikasihani dan dirawat untuk kelangsungan hidupnya. Ruang untuk mendapatkan ilmu atau keterampilan bagi penyandang disabilitas pun masih minim.

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 27 ayat 2, yakni: "Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Berkaitan dengan itu, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang juga berhak memperoleh kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama untuk meraih dan memperoleh haknya misalnya dalam bidang Kesehatan dan juga pemberdayaan dalam bidang ekonomi, selain itu juga memiliki hak untuk kehidupanyang layak, dan mempunyai kemampuan dalam berkarya, menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan.

Dari waktu ke waktu penanganan terhadap penyandang disabilitas mengalami perubahan. Perubahan tersebut berjalan beriringan dengan berubahnya pandangan masyarakat luas terhadap isu-isu disabilitas serta model-model pemberdayaan yang tepat bagi kelompok penyandang disabilitas yang biasanya hidup terpinggirkan. Pada awalnya, penyandang disabilitas di hampir semua belahan dunia nyaris tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengintervensi arah dari berbagai kebijakan terkait dengan layanan sosial bagi mereka. para penyandang disabilitas (Pawalin, 2017).

Pergeseran paradigma dalam memaknai disabilitas perlu terus digulirkan seiring dengan semangat perubahan dalam sendi-sendi mendasar pada hak asasi manusia (Santoso & Apsari, 2017). Terjadinya pergeseran paradigma dalam memandang isu-isu disabilitas tidak diragukan lagi, merupakan faktor utama dalam mendorong munculnya berbagai bentuk layanan sosial baru bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Sepanjang sejarah, disabilitas sebagai bagian penting dari *personal tragedy* telah mulai dianggap sebagai salah satu bagian dari tidak aksesibelnya lingkungan

sosial (*inaccessibility of social environment*). Berbagai bentuk modifikasi lingkungan sosial telah banyak dijadikan model penanganan utama dalam meningkatkan level keberfungsian sosial kelompok masyarakat dengan disabilitas. Sebagai contoh, sebut saja terbukanya akses di bidang Kesehatan bagi para penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya paling dini dalam membangun kesetaraan jangka panjang. Para penyandang disabilitas tidak lagi ditepikan dari masyarakat melalui layanan-layanan sosial.

3.2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai penyandang disabilitas yang mana dalam kehidupan sehari-hari kadangkala masih dianggap sebagai suatu hal yang masih tabu dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan baik secara mental maupun fisik dari penyandang disabilitas tersebut. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi stigma dan stereotip yang dapat membatasi akses mereka terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan sosial. Penting untuk mendorong inklusi dan kesadaran masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang setara dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kesejahteraan sosial menjadi hak setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas. Kesejahteraan dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal (Wibawani, 2022). Penyandang disabilitas pada Kota Cirebon sering menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yakni salah satunya dalam hal pemberdayaan kebutuhan layanan Kesehatan serta pemberdayaan dalam bidang ekonomi yang mana sangat dibutuhkan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup penyandang disabilitas. Dalam hal ini penyandang disabilitas memerlukan bantuan secara langsung dari Lembaga pemerintah yang menangani khusus segala keluhan dan kasus dari penyandang disabilitas dalam pemenuhan unsur bantuan sosial secara langsung, baik dari segi pemenuhan terhadap kebutuhan layanan Kesehatan dan juga pemberdayaan ekonomi untuk penyandang disabilitas yang ada pada lingkup Kota Cirebon. Hal ini sebagai salah satu pemenuhan hak dari penyandang disabilitas yang mana sama saja memerlukan bantuan sosial secara langsung karena penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan bantuan.

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam menangani perihal pemberdayaan penyandang disabilitas, dalam hal ini salah satunya ada peran Dinas Sosial dalam menangani urusan yang bersangkutan

dengan penyandang disabilitas, pada Kota Cirebon Dinas Sosial menjadi salah satu adanya program kerja untuk pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Salahsatunya dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas dalam pemenuhan layanan Kesehatan dan pemberdayaan mengenai bidang ekonomi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas yang ada pada lingkup Kota Cirebon.

Pemenuhan layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Kota Cirebon merupakan suatu keharusan. Dalam hal pemenuhan layanan kesehatan, diperlukan pendekatan yang holistik untuk memastikan aksesibilitas, keberlanjutan, dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas, dukungan rehabilitasi, dan program kesehatan preventif yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Di sisi ekonomi, pemberdayaan penyandang disabilitas melibatkan berbagai strategi, seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja inklusif, dan dukungan bagi usaha mikro atau kecil yang dikelola oleh mereka. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian finansial, memperluas peluang pekerjaan, dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang seringkali dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Dalam konteks Kota Cirebon, peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial, sektor kesehatan, dan pelaku ekonomi lokal menjadi kunci. Diperlukan sinergi antarlembaga untuk menciptakan kebijakan dan program yang berkelanjutan, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan potensi penyandang disabilitas. Implementasi inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Cirebon.

3.4. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada penyandang disabilitas

Pemberdayaan merupakan penguatan terhadap masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam suatu proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi masa depannya (Surwanti, 2014). Sehingga bagi penyandang disabilitas perlu adanya pemberdayaan yang mendukung proses dalam kehidupannya dalam setiap aspek kehidupan yang penyandang disabilitas jalani agar tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas itu sendiri yang umumnya disebabkan oleh pemahaman yang keliru tentang penyandang disabilitas (Widinarsih, 2019).

Penyandang disabilitas memerlukan suatu pemberdayaan secara langsung karena penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang

kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Priscyllia, 2016). Dalam hal ini pada Kota Cirebon pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas diberikan bantuan langsung, misalnya bantuan untuk pemenuhan layanan publik. Pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah dalam bentuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Pramashela & Rachim, 2021). Dalam hal ini adanya pelayanan public berupa layanan Kesehatan dan berkaitan dengan layanan public dari segi ekonomi. Hal ini berkaitan langsung dengan divisi Liposos, PP dan LBK. Karna pada Dinas Sosial Kota Cirebon bertugas melaksanakan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dalam hal ini penanganannya diutamakan fokus pada SPM Bidang Sosial. Pada pelaksanaan kegiatan dilapangan tentunya dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan secara optimal dalam penanganannya, sesuai moto, "Melayani dengan hati dan penuh dengan kehati-hatian", sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas umumnya.

UPT. Liposos Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya, salah satunya volume kerja yang cukup kompleks penanganannya karena berbagai macam ragam disabilitas, Gelandangan, Pengemis, PSK, pemulung, odgj, dan lainnya yang semuanya berpangkal masalah seperti himpitan ekonomi, sakit menahun atau sakit sejak lahir, terlantar, tidak punya keluarga, tidak punya identitas apalagi BPJS, dan lainnya. Semua permasalahan harus diberikan solusinya.

Begitupun Penyediaan data yang harus terus terupdate karena sering terjadi perpindahan tempat tinggal, meninggal dunia dan lainnya, yang tidak diketahui dan tidak melaporkan kepada aparat setempat. Penanganan masalah kesejahteraan sosial UPT. Liposos, PP dan LBK yang terus perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar semakin dapat dirasakan baik oleh masyarakat maupun penerima manfaatnya.

Adapun Tugas pokok dan fungsi UPT Liposos, PP dan LBK berdasarkan perwal. Pembentukan upt. Nomor 47 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dan pedoman teknis oprasional lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya;
- b) Pelaksanaan lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya yang meliputi pemyediaan layanan dan pengelolaan lingkungan

pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- c) Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya.

Adapun layanan UPT LIPOSOS, PP dan LBK adalah sebagai berikut:

- a) Layanan data dan pengaduan
- b) Layanan kedaruratan
- c) Penyediaan permakanan
- d) Penyediaan sandang
- e) Penyediaan alat bantu
- f) Penyediaan perbekalan Kesehatan
- g) Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial
- h) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis
- i) Fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak, BPJS, dan lain sebagainya
- j) Akses kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar
- k) Pemberian layanan penelusuran keluarga
- l) Pemberian layanan reunifikasi keluarga
- m) Fasilitasi pemulasaran terlantar.

Adapun tujuan dari UPT LIPOSOS, PP dan LBK adalah sebagai berikut:

- a) Memulihkan rasa harga diri, percaya diri, cinta kerja, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depannya, keluarga maupun masyarakat dan lingkungan sosialnya;
- b) Memulihkan kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
- c) Mencegah tumbuh dan berkembangnya pandangan yang negative dari masyarakat terhadap tuna sosial
- d) Menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat tentang keadaan, permasalahan tuna sosial sehingga masyarakat menerima kehadiran tuna sosial dan bergerak untuk mendukung serta mengembangkan usaha-usaha dan program rehabilitasi sosial.

Pemberdayaan Sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga maupun suatu kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar dapat berdaya sehingga mampu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Mengenai pemberdayaan sosial pada penyandang disabilitas, kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial yakni

salah satunya memudahkan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pemenuhan dalam layanan Kesehatan, layanan Kesehatan yang diberikan disesuaikan dengan tata cara yang terstruktur untuk pengajuan pemberian bantuan layanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan.

Tahapan awal yang dilakukan yakni dengan kegiatan lapangan penelusuran keluarga, dengan melacak keberadaan klien penyandang disabilitas yang dinformasikan baik dari masyarakat maupun dari lembaga atau media Sosial dan lainnya. Kemudian dengan reunifikasi keluarga atau melalui Lembaga dinas yang bersangkutan dengan melakukan penjemputan dan pengantaran kepada keluarganya atau melakukan penjemputan dan pengantaran kepada Pihak Balai, yayasan dan Dinas Sosial lainnya sesuai kesepakatan.

Biasanya ada juga melalui pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas serta bantuan lainnya mengenai kebutuhan dasar penerimaan manfaat bagi penyandang disabilitas yaitu dengan memfasilitasi dan menyalurkan bantuan alat bantu dan bantuan lainnya bagi penyandang disabilitas. Alat bantu yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas yang mengajukan permintaan bantuan alat bantu, misalnya berupa kursi roda, alat bantu dengar, kaki atau tangan palsu dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas itu sendiri.

Kemudian jika pihak keluarga dan penyandang disabilitas belum mempunyai BPJS dan bahkan belum mempunyai surat kependudukan lainnya maka pihak Dinas Sosial akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pemenuhan hak kepemilikan identitas kependudukan khususnya disabilitas. Serta adanya bantuan CSR yaitu Melakukan pendekatan dan koordinasi kepada pihak stakeholder eksternal atau pihak swasta lainnya guna memenuhi kebutuhan bantuan bagi penyandang disabilitas.

Mengenai pemberdayaan pada bidang ekonomi bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Cirebon adanya kegiatan Bimbingan Keterampilan dan Usaha, dalam hal ini pihak Dinas Sosial berperan sebagai fasilitator bagi para penyandang disabilitas untuk pemberian bantuan berupa bimbingan mengenai pelatihan keterampilan serta pemberian modal usaha kepada penyandang disabilitas.

Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan mengenai ekonomi keluarga dan penyandang disabilitas, kegiatannya yakni merekrut peserta

pelatihan penyandang disabilitas yang sesuai dengan minat dan keahliannya. Kemudian akan diberikan pelatihan dasar keterampilan bagi penyandang disabilitas, contoh kegiatannya yakni pelatihan keterampilan menjahit bagi penyandang disabilitas, kemudian pelatihan keterampilan membuat kue dan memasak serta diajarkan pelatihan bagaimana strategi dalam memasarkan suatu produk guna melatih pemahaman dan keterampilan bagi penyandang disabilitas untuk bisa lebih mandiri kedepannya agar dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya secara ekonomi.

Selain itu adanya penunjang bagi penyandang disabilitas untuk pemberian modal usaha dan bimbingan keterampilan dalam berniaga untuk bisa melanjutkan kegiatan bimbingan keterampilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas agar kedepannya keterampilan tersebut dapat menjadi kegiatan usaha bagi para penyandang disabilitas di Kota Cirebon. Kemudian adanya kegiatan monitoring guna untuk memantau perkembangan dari binaan penyandang disabilitas dalam pengelolaan usaha yang dijalani dan evaluasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas guna untuk mengetahui dan memberikan arahan bagi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan penyandang disabilitas.

4. KESIMPULAN

Dinas Sosial mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dan hak yang dimiliki penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kota Cirebon menjalankan peran yang cukup baik dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, terutama dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan aspek ekonomi. Meskipun demikian, pencapaian maksimal belum sepenuhnya terwujud karena menghadapi beberapa hambatan di luar aspek teknis pelaksanaan. Hambatan-hambatan tersebut melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi, di antaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program pemberdayaan disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Keterbatasan pemahaman ini mempengaruhi efektivitas implementasi program dan dampak yang diinginkan. Faktor dominan yang perlu ditingkatkan untuk mendukung kesuksesan pemberdayaan adalah motivasi internal dari penyandang disabilitas sendiri. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan sosialisasi program kepada masyarakat, pendekatan edukatif untuk meningkatkan pengetahuan, dan pemberian motivasi kepada penyandang disabilitas agar lebih proaktif dalam mengembangkan potensi mereka. Dinas Sosial berperan sebagai fasilitator pemberian bantuan berupa bimbingan mengenai pelatihan keterampilan serta pemberian modal usaha kepada penyandang disabilitas.

Dengan demikian, upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Cirebon dapat mencapai tingkat efektivitas yang lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Mengucapkan terima kasih kepada pengelola atau tim redaktur Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, A., & Afandi, M. (2019). Pemberdayaan dan pendampingan komunitas penyandang disabilitas dalam mengakses Pendidikan tinggi. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2), 153-166.
- Dhairyya, A. P., & Herawati, E. (2019). Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung. *Umbara*, 4(1), 53-65.
- Luthfia, A. R. (2020). Urgensi pemberdayaan penyandang disabilitas di masa pandemi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 38-44.
- Mulyanah, M. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 128-135.
- Nuraviva, L., Harsasto, P., & Alfindaus, L. K. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik di Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(1), 1-10.
- Pawalin, O. (2017). *Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*.
- Pemda Kota Cirebon. (2023a). *Dinas Sosial Kota Cirebon Kota Cirebon*. Open Data Kota Cirebon.
https://opendata.cirebonkota.go.id/organisasi/dinas_sosial_kota_cirebon
- Pemda Kota Cirebon. (2023b). *SKPD Dinas Sosial*. Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Cirebon. <https://data.cirebonkota.go.id/organisasi/skpd/225>
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225-232.
- Priscyllia, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Lex Crimen*, 5(3).
- Purnaningrum, E., Dwiarta, I. M. B., Aripriabowo, T., Waryanto, R. B. D., & Prasetyo, A. (2021). Pemberdayaan UMKM Disabilitas Trenggalek untuk Peningkatan Pendapatan Pasca Pandemi melalui Upgrading Sosial Media. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 94-99.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran paradigma dalam disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166-176.
- Sholeh, A. (2016). Islam dan penyandang disabilitas: telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di indonesia. *PALASTREN: Jurnal*

- Studi Gender*, 8(2), 293–320.
- Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggunharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 27–50.
- Surwanti, A. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1), 40–58.
- Susilawati, I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif “Limbah Singkong” Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 14(2), 224–242.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945).
- Wibawani, S. (2022). Strategi Pemberdayaan Program Karepe Dimesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 229–237.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.
- Wijayanto, A. A. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Metro Tahun 2022*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

